

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DESA TEGALWATON TAHUN ANGGARAN 2024



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

DESA : TEGALWATON

KECAMATAN : TENGARAN

KABUPATEN : SEMARANG

TAHUN 2024



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN TENGARAN
DESA TEGALWATON

Jalan Letnan Jendral Soemitro Nomor 17 -Desa Tegalwaton - Kode Pos 50775

email: tegalwatondesa@gmail.com

Tegalwaton, 31 Desember 2024

Nomor : 140/017/XII/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : LPPD Kepala Desa Tegalwaton
Tahun Anggaran 2024


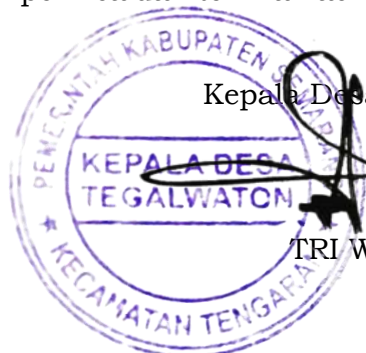
KEPADA YTH. :
BUPATI SEMARANG
Cq. CAMAT TENGARAN
Di –

SEMARANG

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 maka perlu kami laporkan kepada Bupati Semarang mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tegalwaton yang dibuat berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia no.46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa tahun 2024.

Laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab selama menjabat tahun anggaran 2024 ini kami sampaikan dalam LPPD Kepala Desa Tegalwaton tahun anggaran 2024 Kepada Bupati Semarang melalui Camat Tengarana, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih atas perhatiannya.

Kepala Desa Tegalwaton

TRI WURYANTO


KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah, taufik dan HidayahNya, sehingga saya dapat menjalankan tugas yang diamanatkan sebagai Kepala Desa Tegalwaton tahun anggaran 2024.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2024 di Desa Tegalwaton dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terutama kepada:

1. Camat Tenganan dan seluruh jajarannya atas bimbingan dan arahnya.
2. Pendamping desa atas bimbingan, saran dan bantuannya.
3. Ketua BPD dan anggota BPD atas masukan dan kerjasamanya.
4. Perangkat Desa Tegalwaton dan staff atas dukungan dan semangatnya.
5. Lembaga kemasyarakatan Desa, PKK, RT/RW, LKMD, KPMD, BUM DESa, Karang Taruna, Pokdarwis, Posyandu, FKD, Gapoktan, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, dan seluruh warga masyarakat Desa Tegalwaton atas kepercayaan, dukungan, partisipasi dan kerjasamanya.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini saya buat, kritik dan saran akan menjadikan perhatian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf akan segala kekurangan.

Tegalwaton , 31 Desember 2024

Kepala Desa Tegalwaton

TRI WURYANTO

BAB I PENDAHULUAN

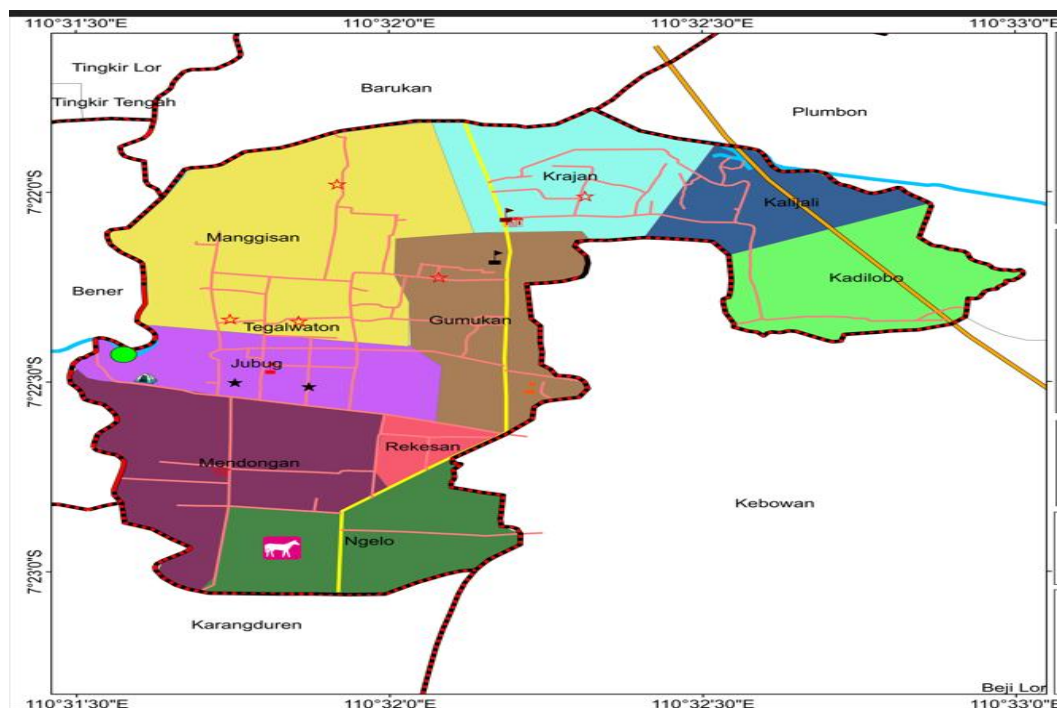
A. GAMBARAN UMUM DESA

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran secara umum tentang Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

Desa Tegalwaton berada pada ketinggian 575 m dari dasar permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 3.480 mm, dengan suhu rata-rata 24°C. Luas wilayah Desa Tegalwaton yaitu 346.280 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- a. luas tanah sawah sebesar 73.140 Ha
- b. Luas tanah tegalan 47,210 Ha
- c. Luas tanah Pemukiman 221,640 Ha
- d. Luas lain-lain 4,290 Ha.



Batas wilayah Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut:

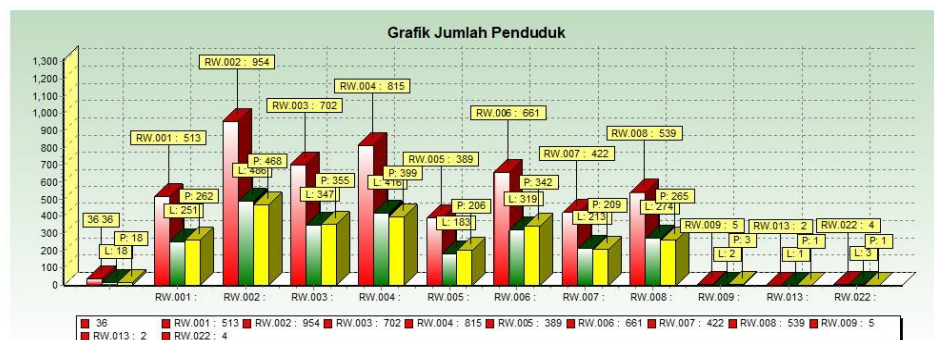
- a. Sebelah Utara : Barukan Kecamatan Tengaran, dan Kelurahan Tingkir Kota Madya Salatiga.
- b. Sebelah Selatan : Desa Karangduren Kecamatan Tengaran
- c. Sebelah Barat : Desa Bener Kecamatan Tengaran
- d. Sebelah Timur : Desa Kebowan Kecamatan Suruh.

2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk di Desa Tegalwaton berdasarkan data terakhir per tanggal 31 Desember 2024 terdiri 1.677 KK , dengan jumlah penduduk 5.042 orang yang terdiri dari 2.513 Laki-laki, dan 2.529 Perempuan. Dimana sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh pabrik, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dimana kebanyakan warga adalah tamatan SD. Berikut Jumlah penduduk Desa Tegalwaton berdasar masing-masing kategori :

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

NO.	Keterangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	jumlah	2.527	2.529	5.042

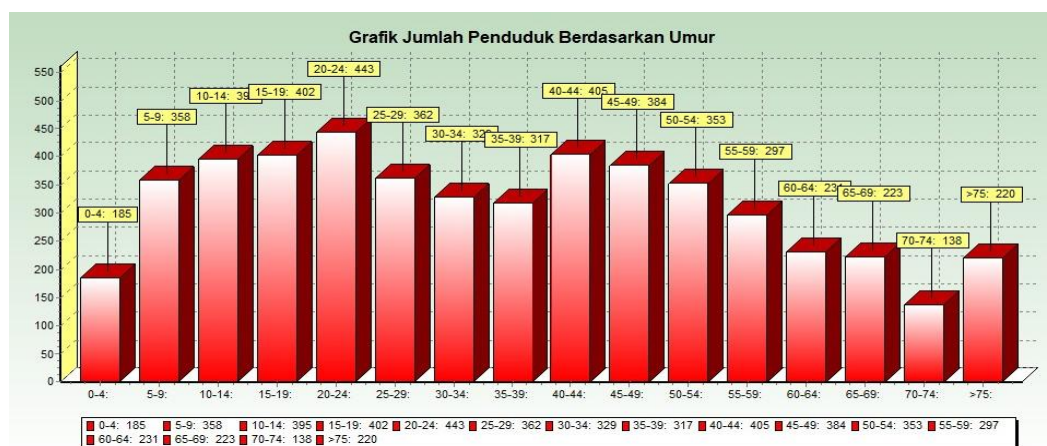


- b. Jumlah penduduk berdasarkan agama

NO.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	2.450	2.473	4.923
2	Kristen	48	44	92
3	Katholik	11	9	20
4	Hindu			
5	Budha	3	3	6
6	Konghuchu			
7	Kepercayaan	1		1
Total		2.513	2.529	5.042

- c. Jumlah penduduk berdasarkan umur

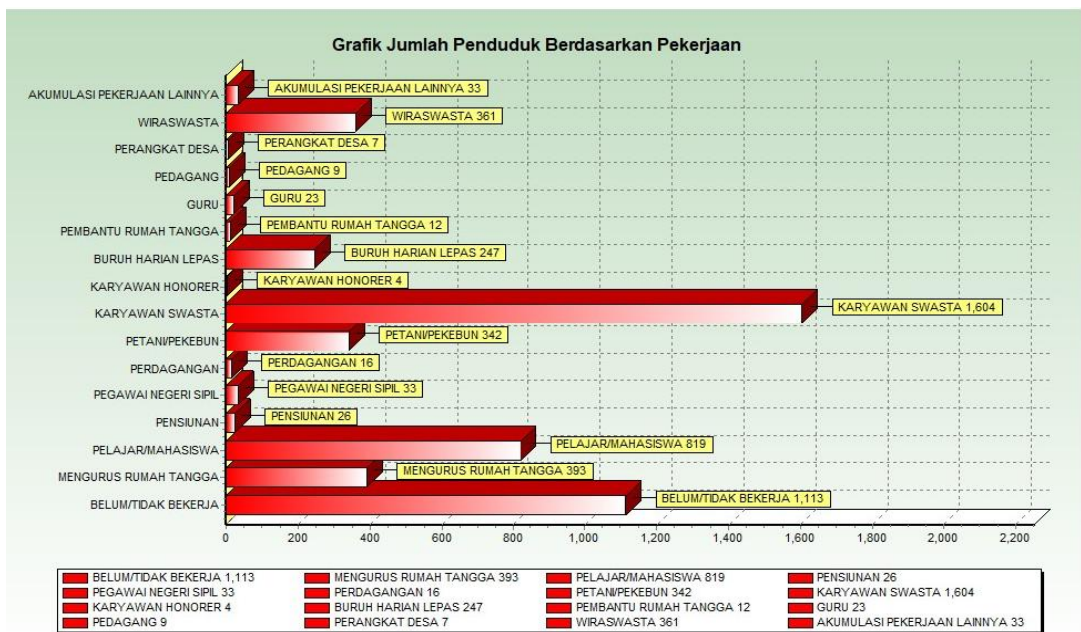
NO.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	92	94	186
2.	5-9	183	174	357
3.	10-14	198	197	395
4.	15-19	206	196	402
5.	20-24	232	211	443
6.	25-29	198	164	362
7.	30-34	143	186	329
8.	35-29	134	145	318
9.	40-44	182	222	404
10.	45-49	204	181	385
11.	50-54	184	170	354
12.	55-59	148	147	295
13.	60-64	107	124	231
14.	65-69	105	118	223
15.	70-74	63	75	138
16.	>=75	95	125	220
Total		2.513	2.529	5.042



d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan

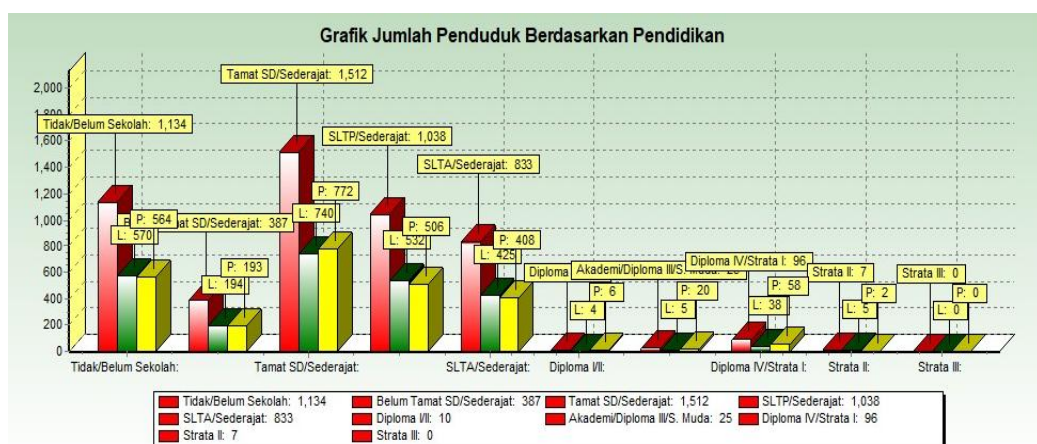
NO.	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum / Tidak Bekerja	565	548	1.113
2.	Mengurus Rumah Tangga	1	392	393
3.	Pelajar/Mahasiswa	438	381	819
4.	Pensiunan	15	11	26
5.	PNS	17	16	33
6.	TNI	3		3
7.	POLRI	4		4

8.	Perdagangan	3	13	16
9.	Petani	206	136	342
10.	Industri	1		1
11.	Konstruksi	1		1
12.	Transportasi	1		1
13.	Karyawan swasta	863	741	1604
14.	BUMN	2		2
15.	BUMD	1		1
16.	Honorer	2	2	4
17.	Buruh Lepas Harian	148	99	247
18.	Buruh Tani/ Perkebunan	2	1	3
19.	Buruh Peternakan	2		2
20.	Pembantu Rumah Tangga	6	6	12
21.	Tukang Jahit	1	2	3
22.	Pendeta	2	2	4
23.	Dosen	1		1
24.	Guru	6	17	23
25.	Perawat		1	1
26.	Sopir	4		4
27.	Pedagang	5	4	9
28.	Perangkat Desa	7		7
29.	Kepala Desa	1	1	2
30.	Wiraswasta	205	156	361
Total		2.513	2.529	5.042



e. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pendidikan

NO.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tdk/Belum Sekolah	570	564	1.134
2.	Belum Tamat SD	194	193	387
3.	Tamat SD	740	772	1.512
4.	SLTP	532	506	1.038
5.	SLTA	425	408	833
6.	D-I/II	4	6	100
7.	D-III	5	20	25
8.	D-IV/S1	38	58	96
9.	S2	5	2	7
Total		2.513	2.529	5.042



3. Kondisi Pemerintahan

Dalam menjalankan program kerjanya, kepala desa dibantu perangkat desa dengan unsur Sekretariat, unsur teknis, dan kewilayahan.

- a. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris desa, dibantu kepala urusan umum dan perencanaan, dan kepala urusan keuangan.
- b. Unsur teknis terdiri dari kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, dan Kasi Kesejahteraan rakyat.
- c. Unsur kewilayahan adalah 8 kepala dusun.

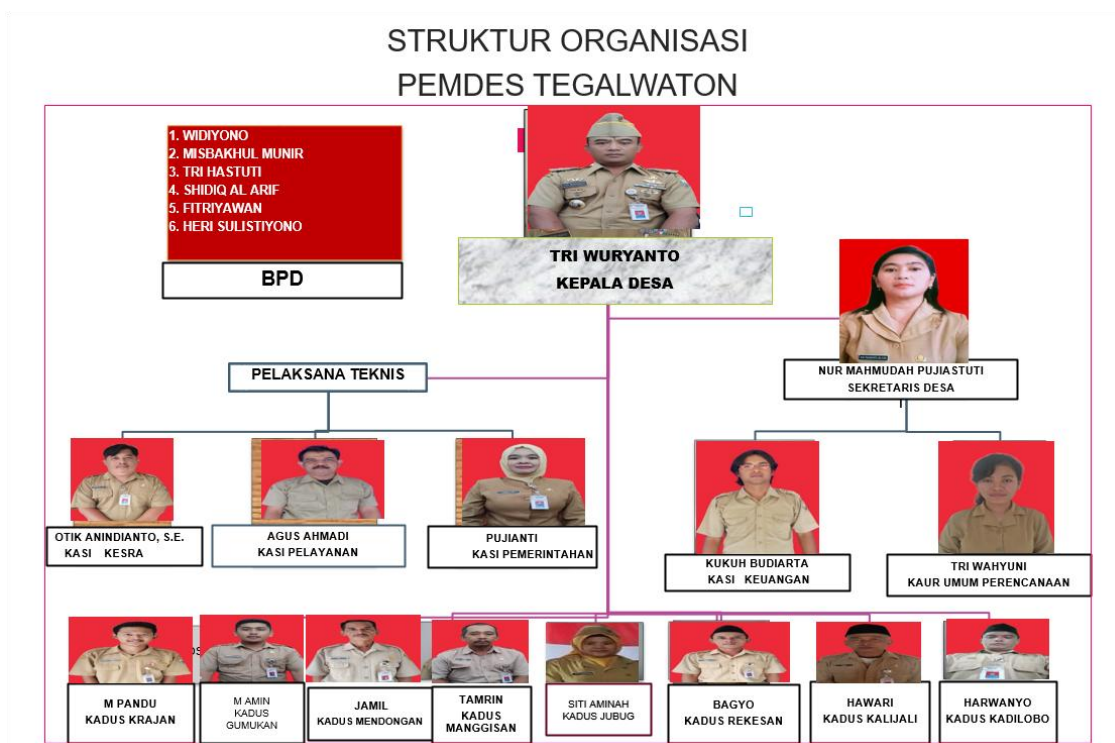
Desa Tegalwaton dibagi menjadi 8 RW sebagai berikut ini:

No	Nama Dusun	Penduduk	Jmlh RT	RW	Ket.
1.	Krajan	512	4	001	RT. 01 - RT. 04
2.	Gumukan	963	5	002	RT. 05 - RT. 09
3.	Jubug	709	3	003	RT. 10 - RT. 12
4.	Manggisan	826	4	004	RT. 13 - RT. 16
5.	Mendongan	390	2	005	RT. 17 - RT. 18
6.	Rekesan-Ngelo	667	5	006	RT. 19 - RT. 23

7.	Kalijali	432	5	007	RT. 24 - RT. 28
8.	Kadilobo	543	6	008	RT. 29 - RT. 34

Adapun susunan Aparatur Pemerintah Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Tri Wuryanto
- b. Sekretaris Desa : N.M. Pujiastuti
- c. Kepala Urusan Umum & Perencanaan : Tri Wahyuni
- d. Kepala Urusan Keuangan : Otik Anindianto
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan : Kukuh Budiarta
- f. Kepala Seksi Pemerintahan : Pujianti
- g. Kepala Seksi Pelayanan : Agus Ahmadi
- h. Kepala Dusun Krajan : M. Pandhu W
- i. Kepala Dusun Gumukan : M. Amin Khoirudin
- j. Kepala Dusun Jubug : Siti Aminah
- k. Kepala Dusun Manggisian : Tamrin
- l. Kepala Dusun Mendongan : Jamil
- m. Kepala Dusun Rekesan-Ngelo : Bagiyo
- n. Kepala Dusun Kalijali : Hawari
- o. Kepala Dusun Kadilobo : Harwanto



B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 ini merupakan keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan dan Kebijakan yang dilakukan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan penanggulangan bencana selama satu tahun anggaran. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pelaksanaan prinsip penyelenggaraan pemerintahan, yaitu transparansi dan akuntabilitas.
2. Sebagai gambaran atas pencapaian tingkat kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kurun waktu satu tahun.
3. Sebagai bahan evaluasi kinerja kepala desa dan pemerintahan desa dalam kurun waktu berjalan
4. Memberikan informasi kepada Bupati, Camat, BPD dan masyarakat atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
5. Memberikan informasi mengenai keberhasilan yang telah dicapai, kendala yang ditemui, dan upaya yang telah dilakukan.
6. Memberikan gambaran terkini mengenai program yang telah dilaksanakan, yang masih berjalan dan yang belum terlaksana.

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Berdasarkan visi atau tujuan yang ingin dicapai oleh kepala desa terpilih tentang gambaran desa yang diharapkan selama 6 tahun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalwaton pada periode 6 (Enam) dimulai tahun 2020-2025 sebagai berikut:

1. Visi Desa

“MEWUJUDKAN DESA TEGALWATON MENJADI DESA MANDIRI SEJAHTERA MELALUI BIDANG PERTANIAN , INDUSTRI KECIL DAN PARIWISATA SERTA PENINGKATAN HASIL PENDAPATAN ASLI DESA”.

Makna yang terkandung dari visi Desa ini adalah :

- Terwujudnya Desa Tegalwaton menjadi desa mandiri yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian dan juga pariwisata.

- Mandiri adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui kemandirian ekonomi.
- Kesejahteraan dapat tercapai dengan Percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan menggali potensi local yang dimiliki desa untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dan ekonomi warga.

2. Misi Desa

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut di atas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya;
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang;
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata;
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, dan adanya kesetaraan gender.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa tegalwaton Tahun anggaran 2024 berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber

pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan

3. Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran dalam hal ini bahwa Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat dengan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa tegalwaton Tahun anggaran 2024 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum untuk mewujudkan Misi Ke-1 yaitu *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 - 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan desa, jalan usaha tani, jembatan, transportasi dan infratrusktur strategis guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.
 - b. Pemerataan penyediaan fasilitas umum, sarana dan prasarana transportasi dan penunjangnya dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. Pengembangan sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata di bidang pertanian.
 - e. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata, berkualitas, dengan kuantitas yang seimbang untuk memudahkan akses masyarakat secara cepat, tepat dan murah.

2. Kebijakan Umum dan program untuk mewujudkan Misi Ke-2 “Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang”
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat untuk menurunkan kematian ibu hamil dan melahirkan, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka stunting dan kurang gizi.
 - b. Peningkatan pelayanan tenaga kesehatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam posyandu lansia, posyandu balita, posbindu dll.
 - c. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pusat pelayanan kesehatan di desa.
 - d. Meningkatnya penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
3. Kebijakan Umum dan program untuk mewujudkan Misi Ke-3 “Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik”

Menciptakan SDM yang beriman bertaqwa kepada Tuhan, berbudaya serta menguasai ilmu, dengan tujuan Mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai IPTEK, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemberian dukungan baik berupa fasilitas dan kebijakan bagi siswa usia belajar terutama bantuan bagi siswa miskin atau berprestasi.
 - b. Memberikan penguatan dan pembinaan pada guru dan sekolah non formal, TPA, TPQ atau sekolah minggu untuk meningkatkan kualitas moral sumber daya manusia.
4. Kebijakan Umum dan program kerja untuk mewujudkan Misi Ke-4 “Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong melalui bidang pertanian dan pariwisata,” dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian dengan bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.

- c. Pemantapan kelembagaan petani agar memperoleh kemudahan akses bahan baku dan teknologi pertanian yang ditunjang dengan perbaikan sarana prasarana.
 - d. Pengembangan wisata yang berbasis masyarakat, budaya, adat istiadat, dan potensi local yang dimiliki dengan mendorong keterlibatan langsung masyarakat sebagai pelaku wisata.
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pengadaan pelatihan-pelatihan, sarasehan, pameran dan juga study banding ke wilayah lain.
5. Kebijakan umum dan program untuk mewujudkan misi ke 5 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, dan adanya kesetaraan gender” sebagai berikut:
- a. Partisipasi masyarakat

Bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang mulai tahap Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap program program yang dilaksanakan.
 - b. Akuntabilitas anggaran, yang artinya seluruh anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan secara jelas sesuai prinsip atau aturan yang berlaku.
 - c. Penerapan prinsip transparansi

Artinya adalah adanya kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - d. Efektivitas dan efisiensi

Bahwa program serta kebijakan harus tepat sasaran atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga program anggaran bisa berjalan efektif dan efisien.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM KERJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Jaminan Sosial BPJS Tenaga kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - c. Jaminan Sosial BPJS Tenaga kerja staff teknis, BPD, RT/RW, LINMAS, Kader POSYANDU, dan POSBINDU.
 - d. Operasional Pemerintah Desa
 - e. Insentif dan Tunjangan RT/RW
 - f. Operasional dan Tunjangan BPD
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarpras Pemerintahan untuk difabel
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan Sarpras Perkantoran / asset tetap
 - c. Penyediaan Sarpras Desa Layak Anak
 - d. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
 - b. Pengelolaan Adminisgrasi Kearsipan Pemerintah Desa
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan desa
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan, dokumen keuangan, kebijakan desa, LPPD,LKPJ, Dll.
 - d. Pengelolaan Adminstrasi dan Inventarisasi asset
 - e. Penyusunan kebijakan desa
 - f. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - g. Dukungan sosialisasi Penjaringan Perangkat Desa

- h. Penyelenggaraan Lomba & Pengiriman Kontingen
- 5. Sub Bidang Pertanahan
 - a. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Mediasi konflik pertanahan
 - c. Penentuan/Penegasan/Patok Tanah Kas Desa
 - d. Pensertifikatan tanah desa

B. PROGRAM KERJA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Bidang Pembangunan Desa tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan
 - a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
 - b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
 - c. Pengelolaan perpustakaan desa
 - d. Pengembangan sanggar seni
2. Sub Bidang Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Polindes Milik Desa
 - b. Polindes obat reagent cek gula, asam urat
 - c. Oprasional Posyandu Lansia
 - d. Oprasional Posyandu Balita
 - e. Penyediaan sarana prasarana posyandu
 - f. PMT Posyandu Balita
 - g. PMT Stunting
 - h. PMT Ibu Hamil
 - i. Pembinaan palang merah remaja
 - j. Incentif posyandu,Posbindu
 - k. Penyuluhan Kesehatan Tenaga dan Kader Kesehatan
 - l. Incentif Kader KPM dan Oprasional
 - m. Pembinaan POSBINDU
 - n. Desa Siaga Kesehatan (STBM,FOGING,AMBULAN Gratis)
 - o. Pengasuhan Bersama /Bina Keluarga Balita (PPKBD)
3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa
 - b. Pembangunan Gedung Serbaguna
 - c. Betonisasi Gumukan RT 6
 - d. Betonisasi Jubug RT.10 (110 X 2,2 X 0,12)

- e. Betonisasi Jubug RT.11 (110 X 2,2 X 0,12)
 - f. Betonisasi Kadilobo RT.29 (70 X 2,3 X 0,12)
 - g. Betonisasi Kalijali (350 x 2,2 x 0,12)
 - h. Betonisasi Krajan (75 X 2,5 X 0,12)
 - i. Betonisasi Manggis (150 X 2.3 X 0,12)
 - j. Betonisasi Mendongan (50 X 2 X 0,12)
 - k. Betonisasi Ngelo (50 X 2,5 X 0,12)
 - l. Talud Jalan Kadilobo RT. 33 (27X 0,45 X 0,1)
 - m. Talud jalan Rekesaan
 - n. Pembangunan Jalut Manggis
 - o. Betonisasi Jalut Guumukan Depan Ernis
 - p. Betonisasi Jalut Gumuman RT 8
4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - a. Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN / RTLH
 - b. Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - c. Pembuatan Bak Tampung
 - d. Pembuatan Jambanisasi
 5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 6. Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral
 - a. Penyediaan energi Biogas
 7. Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pemeliharaan Sarpras Wisata Desa
 - b. Pelatihan BUMDES
 - c. Pembinaan Pokdarwis

C. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Oprasional dan Peningkatan kapasitas LINMAS
 - b. Insentif Linmas
 - c. Pelatihan Mitigasi bencana
 - d. Pengadaan seragam Linmas
 - e. Pembangunan Pos Keamanan desa

2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian Desa
 - b. Festival Kesenian, Adat, Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - c. Penguatan Sejarah Desa
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga
 - b. Pembinaan Karangtaruna
 - c. Pembinaan Organisasi olahraga seperti Karate, Sepakbola, Bola Volly, Badminton, Bola Ping –pong, Panahan, Pencak silat, dll.
4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan PKK, LPMD, KPMD, P3AI, NU, RT/RW, BPD, DLL.

D. PROGRAM KERJA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Pembentukan kelompok peternak
 - b. Peningkatan produksi tanaman pangan
 - c. Penguatan ketahanan pangan
 - d. Pemberian bantuan pupuk
 - e. Pemberian bantuan bibit
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa
 - b. Peningkatan Kapasitas BPD
 - c. Peningkatan kapasitas APH
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 - a. Pelatihan dan penguatan penyandang Difable
 - b. Penyuluhan dan perlindungan anak
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengadaan teknologi tepat guna
5. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan dan pengelolaan BUM Desa
 - b. Peningkatan pasar desa

- c. Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

E. PROGRAM KERJA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT

Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan bencana Desa tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Penanggulangan bencana
 - 1. Penyuluhan kewaspadaan bencana
 - 2. Pemberian vaksin hewan
 - 3. Pemeriksaan jentik
 - 4. Penyuluhan kesadaran pelestarian lingkungan
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 1. Penanganan bencana
 - 2. Penanganan DBD
 - 3. Penyuntikan vaksin
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Penanganan keadaan mendesak / obat-obatan
 - b. Penanganan keadaan mendesak / sembako isolasi
 - c. Penanganan keadaan mendesak / BLT DD

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

A. PERATURAN DESA TENTANG APBDES 2024

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan peraturan pelaksanaan APBDES tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalwaton tahun 2020- 2025, yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2019.
 - b. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2024
 - c. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.
 - d. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 1 tahun 2024 tentang Pembentukan kelembagaan desa.
 - e. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 2 tahun 2024 tentang Penggunaan dana SUTET.
 - f. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2024.
 - g. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 15 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023
 - h. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 1 Tahun 2024 tentang penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa tahun 2024
 - i. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 2 Tahun 2024 tentang pungutan tahun 2024.
 - j. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 3 Tahun 2024 tentang pengelolaan aset desa.
 - k. Peraturan Kepala Desa Tegalwaton Nomor 4 Tahun 2024 tentang penggunaan dana SUTET.

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDES TAHUN 2024

Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDES Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 8 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

C. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Pendapatan desa :	Rp. 3.113.913.300,-
2. Belanja desa :	
a. Bidang Pemerintah Desa	Rp. 2.042.414.042,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 850.130.250,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 211.000.000,-
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 37.651.600,-
e. Bidang Penanggulanga Bencana	<u>Rp. 150.500.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 3.291.695.892,-
Surplus / (Defisit)	Rp. (177.782.592,-)
3. Pembiayaan desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 177.782.592,-
Silpa Tahun Berjalan	<u>Rp. 0,-</u>

D. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024 dapat dirincikan dengan rincian sebagai berikut:

3. Pendapatan desa :	Rp. 3.071.492.560,-
4. Belanja desa :	
f. Bidang Pemerintah Desa	Rp. 1.229.039.762,-
g. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 792.374.250,-
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 198.550.000,-
i. Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 18.025.000,-
j. Bidang Penanggulanga Bencana	<u>Rp. 149.100.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.387.089.012,-
Surplus / (Defisit)	Rp. (684.403.548,-)
3. Pembiayaan desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 177.782.592,-
Silpa Tahun Berjalan	<u>Rp. 862.186.140,-</u>

E. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 PER BIDANG

Realisasi APBDES tahun 2024 perbidang sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	Siltap dan tunjangan kepala desa	69.700.000,-	67.700.000,-	2.000.000,-
2.	Siltap dan tunjangan perangkat	657.700.000,-	641.896.000,-	15.804.000,-
3.	BPJS Tenaga Kerja Perangkat	30.700.000	29.927.040	772.960,-
4.	BPJS Tenaga Kerja BPD	1.200.000	1.171.324	28.676,-
5.	BPJS Tenaga Kerja RT RW	7.100.000	7.027.952	72.048,-
6.	BPJS Tenaga Kerja LINMAS	5.400.000	4.685.293	714.707,-
7.	BPJS Tenaga Kerja Staff	550.000	492.141	57.859,-
8.	BPJS Kesehatan Staff	200.000		200.000,-
9.	Oprasional pemdes	27.077.680	24.377.000	2.700.000,-
10.	Honor tim dan pelayanan	118.458.260	118.458.000	260,-
11.	Operasional perkantoran Tol, sutet	28.796.592	17.364.512	11.432.080,-
12.	Tunjangan BPD	51.940.000	51.940.000	
13.	Operasional BPD	4.000.000	4.000.000	
14.	Insentif RT, RW, Dusun	59.600.0000	59.600.000	
15.	Penyediaan sarpras	66.767.770	45.138.500	21.629.270,-
16.	Pemeliharaan sarpras	8.370.700	7.050.000	1.320.700,-
17.	Pembangunan Gedung kantor	820.933.040	101.677.000	719.256.040,-
18.	Administrasi kependudukan	5.000.0000	2.000.000	3.000.000,-
19.	Musren Desa/Apbdes (Reguler)	9.000.000	8.912.000	88.000,-
20.	Musdesa(Musdus, Rembug Desa	6.000.000	4.900.000	1.100.000,-
21.	Penyusunan Dok. Keuangan	1.120.000	1.120.000	
22.	Pengelolaan Inventarisasi aset	3.000.000		3.000.000,-
23.	Penyusunan Kebij Desa (Perdes))	3.000.000		3.000.000,-
24.	Bantuan Pilkada	7.750.000	10.650.000,-	-2.900.000,-
25.	Sistem Informasi Desa (WEBSITE)	1.000.000	903.000	97.000,-
26.	Lomba & Pengiriman Kontingen	12.000.000	12.000.000	
27.	Batas Patok	32.250.000	2.250.000	30.000.000,-
28.	Pertanahan pajak PBB	3.800.000	3.800.000	
TOTAL		2.042.414.042,-	1.229.039.762,-	813.374.280,-

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	Bantuan guru TPQ	20.000.000,-	20.000.000,-	
2.	Pemeliharaan perpustakaan	2.500.000,-	2.500.000,-	
3.	Penyelenggaraan Polindes Milik Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	
4.	Polindes obat reagent cek gula, asam urat	2.000.000,-	2.000.000,-	
5.	Insentif KPM	1.200.000,-	1.200.000,-	
6.	Bantuan operasional kpm	1.000.000,-	1.000.000,-	
7.	Bantuan operasional e -ppgbm	600.000,-		600.000,-
8.	PPKBD	1.000.000,-	1.000.000,-	
9.	operasional posbindu	2.000.000,-	2.000.000,-	
10.	insentif posbindu	4.200.000,-	4.200.000,-	
11.	rembug stunting	1.500.000,-	1.500.000,-	
12.	Operasional posyandu	5.000.000,-	5.000.000,-	
13.	PMT Balita	42.000.000,-	39.800.000,-	2.200.000,-
14.	Honor/ insentif Posyandu	75.000.000,-	75.000.000,-	
15.	Kegiatan penyuluhan	3.000.000,-	2.000.000,-	1.000.000,-
16.	Desa Siaga (ambulan gratis, senam, penyuluhan)	16.303.250,-	11.728.250,-	4.575.000,-
17.	PMI	900.000,-	900.000,-	
18.	Sarpras Posyandu	29.800.000,-	29.000.000,-	800.000,-
19.	Pengerasan jalan aspal Kadilobo	130.000.000,-	130.000.000,-	
20.	Betonisasi jalan	198.863.000,-	195.052.000,-	3.811.000,-
21.	Pembangunan Jalan Usaha Tani	223.264.000,-	191.932.000,-	31.332.000,-
22.	Bantuan RTLH	65.100.000,-	65.100.000,-	
23.	Informasi publik	2.500.000,-	2.500.000,-	
24.	Operasional mobil siaga dan mobil ambulance, kendaraan dinas kades	5.000.000,-	5.000.000,-	
25.	Pajak mobil siaga dan mobil ambulance, kendaraan dinas kades	2.000.000,-	1.062.000,-	938.000,-
26.	Pemeliharaan mobil siaga dan mobil ambulance, kendaraan dinas kades	1.400.000,-	1.400.000,-	
27.	Pembuatan Lahan parkir	12.500.000,-		12.500.000,-
28.				
TOTAL		850.130.250,-	792.374.250,-	57.756.000,-

c. Bidang Pembinaan Masyarakat

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	Mitigasi Bencana	12.500.000,-	11.650.000,-	850.000,-
2.	Oprasional dan incentif linmas	12.750.000,-	12.750.000,-	
3.	Pembuatan poskamling	15.000.000,-	15.000.000,-	
4.	Pembelian Gamelan	100.000.000,-	100.000.000,-	
5.	Merti desa dan HUT RI	22.750.000,-	11.750.000,-	11.600.000,-
6.	Pembinaan kesenian	5.000.000,-	5.000.000,-	
7.	Pembinaan Karangtaruna	5.000.000,-	5.000.000,-	
8.	Pembinaan Sepakbola	2.000.000,-	2.000.000,-	
9.	pembinaan seragam bulu tankis	2.000.000,-	2.000.000,-	
10.	Pembinaan KKI	2.000.000,-	2.000.000,-	
11.	Pembinaan pagar nusa	1.000.000,-	1.000.000,-	
12.	Pembinaan p3ai	1.000.000,-	1.000.000,-	
13.	incentif Pembinaan PKK	15.000.000,-	15.000.000,-	
14.	Oprasional PKK	15.000.000,-	15.000.000,-	
		211.000.000,-	198.550.000,-	12.450.000,-

d. Bidang Pemberdayaan Manusia

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.000.000,-		13.000.000,-
2.	Peningkatan Kapasitas APH	6.576.000,-		6.576.000,-
3.	Pelatihan PIRT	4.075.000,-	4.075.000,-	
4.	Bantuan warga miskin	14.000.000,-	13.950.000,-	50.000,-
		37.651.600,-	18.025.000,-	19.626.600,-

e. Bidang Penanggulangan Bencana

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1.	Penanggulangan bencana	5.137.250,-	5.100.000,-	37.250,-
2.	Keadaan Darurat	1.362.750,-		1.362.750,-
3.	BLT DD	144.000.000,-	144.000.000,-	
		150.500.000,-	149.100.000,-	1.400.000,-

BAB IV
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tegalwaton adalah sebagai berikut ini :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. **KEBERHASILAN YANG DICAPAI**
 - a. Pemberian Jaminan social BPJS Tenaga Kerja Linmas
 - b. Pemberian Jaminan social BPJS Tenaga Kerja RT/RW
 - c. Pemberian Jaminan social BPJS Tenaga Kerja BPD
 - d. Pemberian Tunjangan ke -13 bagi perangkat desa
 - e. Pemberian tunjangan RT, RW dan BPD dari ADD dan PAD
 - f. Pensertifikatan tanah TOL
2. **PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**
 - a. Kurangnya kapasitas kemampuan perangkat desa, yang menyebabkan administrasi tidak rapi
 - b. Minimnya pemantauan langsung dan pembinaan baik itu dari pemerintah tingkat kecamatan maupun dari tingkat kabupaten.
 - c. Tingkat kesejahteraan perangkat desa yang masih dibawah standar mengakibatkan mereka cenderung untuk menomor duakan pekerjaan pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparat pemerintah desa . Rata rata mereka mencari pekerjaan sambilan sehingga kurang fokus terhadap tanggungjawab yang di embannya.
 - d. Inventarisasi asset sangat sulit dilaksanakan, dengan belum selesainya tukar guling tanah pacuan dan juga tanah bengkok yang terkena jalan tol, dimana data otentik sangat minim.
 - e. Aset desa banyak terjadi perubahan baik kepemilikan, perjanjian sewa, dan pemindahtanganan dan alih fungsi yang belum diinventarisasi dengan baik.
 - g. Kurangnya kesadaran wajib pajak pemilik tanah di dalam dan diluar Desa Tegalwaton untuk melaporkan setiap transaksi pemindahan hak atas tanah

- h. Terdapatnya perbedaan perhitungan administrasi, baik karena tanah sudah terjual kepada tol ataupun karena NJOP.
 - i. Kenaikan baku PBB.
 - f. Kepala Dusun Tidak tertib dalam menyetorkan pajak.
 - g. Pembayaran pajak PBB tidak disalurkan dengan benar
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Peningkatan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa untuk menambah pengetahuan dan juga ketrampilan
 - b. Pembinaan dan Evaluasi kerja bagi perangkat desa secara rutin dalam rapat Seninan.
 - c. Inventarisasi asset diupayakan disusun dengan jelas dan teliti melalui pembentukan tim khusus untuk melakukan inventarisasi seluruh asset
 - d. Perlunya peningkatan PAD melalui Bumdes, sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan terhadap pengelolaan Bumdes.
 - e. Mediasi dan penyelesaian penggunaan asset desa oleh pihak lain
 - f. Pembinaan kepala dusun dan pemantauan atas penyeteran pajak dan penyampaian kitir Pajak PBB.
 - g. Penyuluhan tentang pertanahan, baik jual beli, status tanah, waris, bukti kepemilikan dll.

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI
- a. Pemberian bantuan kepada Insentif guru TPQ
 - b. Pemberian tambahan insentif Kader Posyandu dari PAD
 - c. Pelaksanaan anggaran desa siaga sangat membantu warga miskin berobat dengan gratis menggunakan mobil ambulance desa maupun mobil jenazah desa.
 - d. Pengadaan sarana prasarana perputakaan desa
 - e. Pemantauan kesehatan balita dan lansia rutin dengan cek kesehata gratis
 - f. Pengadaan sarana prasana posyandu
 - g. Bantuan Jambanisasi
 - h. Pembangunan lahan parkir
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- a. Jalan Kabupaten rusak parah, samapai hari ini belum ada tindak lanjut
 - b. Banyak warga masuk dalam jerat narkoba dan HIV

- c. Kurangnya kesadaran warga dalam mengelola sampah
 - d. Tidak ada Tempat pembuangan sampah akhir komunal
 - e. Peningkatan dan pemeliharaan energy alternative belum bisa dilaksanakan
 - f. Pembangunan gedung olahraga atau gedung serba guna belum bisa dilaksanakan
 - g. Pembangunan gedung balaidesa belum bisa dilaksanakan
 - h. Program satu atap dengan SD sampai hari ini belum bisa dilaksanakan
 - i. Gedung pelayanan desa tidak layak
 - j. Penyelesai
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Pembangunan infrastruktur, jalan desa, jalut, talud, jambanisasi diupayakan bantuan dari sumber APBD Kabupaten dan provinsi
 - b. Meningkatkan kesadaran warga dan pengelola dalam Pemeliharaan energy alternative
 - c. Meningkatkan kesadaran pengelola sampah untuk mengaktifkan organisasi
 - d. Pelatihan dan pembinaan Bumdes harus dilakukan secara intens dengan pendampingan
 - e. Mengajukan Kembali surat permohonan pengembalian Aset milik desa yang dipergunakan instansi

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI
- a. Banyak muncul atlit atlit berprestasi dari klub olahraga desa yang menjuarai tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten dan nasional.
 - b. Munculnya grup kesenian lokal karawitan dan reog anak anak
 - c. Pengadaan gamelan desa
 - d. Semangat dan kesadaran warga untuk rajin berolahraga meningkat
 - e. Pemberian insentif Linmas untuk meningkatkan semangat dan penghargaan kepada anggota linmas
 - f. Pemberian insentif PKK dari bantuan kabupaten
 - g. Pelatihan anggota linmas untuk meningkatkan kapasitas anggota
 - h. Pelatihan mitigasi bencana
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- a. Sarana prasaran olahraga yang ada di desa kurang memadai, sehingga latihan banyak dilakukan dengan keluar desa

- b. Kurangnya pengetahuan warga mengenai bahaya media social
 - c. Kurangnya sarana prasarana desa untuk menampung kreatifitas remaja.
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Pengajuan bantuan Pembangunan sarana prasarana olahraga desa
 - b. Peningkatan Pembinaan kepada lembaga desa oleh perangkat desa
 - c. Pemberdayaan warga dalam penyuluhan bahaya media social
 - d. Pendampingan korban penculikan dan pembunuhan dengan pelatihan
 - e. Bekerja sama dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS untuk penanganan kriminalitas.

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI
- a. Pengadaan pelatihan perangkat desa, BPD, Lembaga Desa
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- a. Pembinaan kepada kaum difabel belum bisa dilaksanakan dengan baik atau secara kontinyu
 - b. Pelatihan menjahit belum bisa dilaksanakan karena minimnya modal yang dipakai
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Pembentukan pengurus lembaga khusus difabel untuk bisa melakukan pembinaan dan pendampingan secara intens
 - b. Pelatihan pelatihan akan diupayakan bekerja sama dengan LPK yang menyediakan sarpras dan agar lulusannya bisa mendapat penyaluran kerja.

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

1. KEBERHASILAN YANG DICAPAI
- a. Kesiap siagaan dalam pencegahan DBD
 - b. Kesiap siagaan dalam pencegahan penyakit hewan
 - c. Antusiasme kader dalam upaya meningkatkan serajat kesehatan warga sangat tinggi
2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- a. Kurangnya sarana prasarana dalam penanganan bencana
 - b. Belum punya APAR
3. UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
- a. Pemenuhan sarana prasarana dasar
 - b. Melakukan pembinaan pentingnya kesadaran tanggap bencana

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2024 adalah Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".
2. Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Program kegiatan Desa Tegalwaton tahun 2024 merujuk pada RPJM Desa Tegalwaton periode 2020-2025, dan juga RKP Desa tahun 2024, yang kemudian ditetapkan Peraturan Desa.
3. Bahwa pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar.

B. SARAN

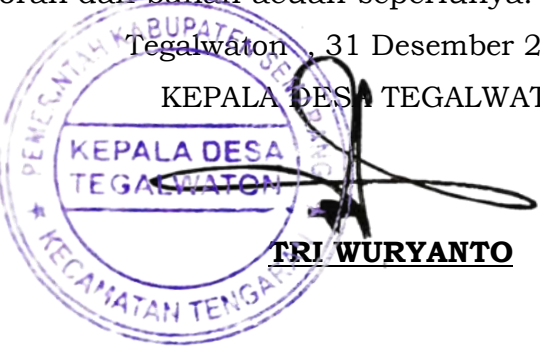
1. Perlu adanya pembinaan dan pemantauan secara periodik dari pemerintah kecamatan/kabupaten untuk memperbaiki berbagai permasalahan di desa.
2. Perlu adanya kerjasama dan keterlibatan secara langsung, terprogram dan berkesinambungan antara semua stake holder baik masyarakat, pemerintah desa, kecamatan dan pendamping desa mulai dari perencanaan,

Kami sampaikan terimakasih kepada seluruh stake holder Dan masyarakat sehingga pelaksanaan seluruh program kegiatan tahun anggaran 2024 berjalan dengan baik dan lancar dan aman

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai laporan dan bahan acuan seperlunya.

Tegalwaton, 31 Desember 2024

KEPALA DESA TEGALWATON


TRI WURYANTO

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024
3. Rincian Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tegalwaton Tahun Anggaran 2024

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-Undangan	a. Peraturan Desa	10
		b. Peraturan Kepala Desa	10
		c. Keputusan Kepala Desa	56
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-Laki	2513
		2) Perempuan	2529
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.677
		4) Jumlah Anggota Keluarga	5.042
		5) Jumlah Jiwa	5.042
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Tidak Sekolah	1.134
		2) Belum tamat SD	387
		3) Tamat SD	1.512
		4) SLTP	1.038
		5) SLTA	833
		6) DI/DII	10
		7) D III	25
		8) D IV/S1	96
		9) S 2	7
		10) S 3	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:	
		1) Tidak Bekerja	1.113
2) Ibu Rumah Tangga	393		
3) Pelajar	819		
4) Pensiunan	26		
5) PNS	33		

		6) TNI	3
		7) Polisi	4
		8) Pedagang	16
		9) Petani	342
		10) Industri	1
		11) kontruksi	1
		12) transportasi	1
		13) karyawan swasta	1.604
		14) BUMN	2
		15) BUMD	1
		16) Honorer	4
		17) Buruh Harian Lepas	247
		18) Buruh Tani	3
		19) Burh Peternakan	2
		20) Pembantu RT	12
		21) Tukang Jahit	3
		22) Pendeta	4
		23) Dosen	1
		24) Guru	23
		25) Perawat	1
		26) Sopir	4
		27) Pedagang	9
		28) Perangkat Desa	7
		29) Kepala Desa	2
		30) wiraswasta	361
		d. Data Kepemilikan Tanah	
		1) C Desa	Ada
		2) Sertifikat Tanah Desa	Ada
		3) Tanah Tukar guling Pacuan	Belum selesai
3.	Pertanahan	a. Tanah ganti rugi tol	Kurang 1 sertifikat
		1) Luas Tanah:	346.280
		b. Peruntukan (dalam ha):	
		1) Jalan	1,7
		2) Tanah Ladang	10,5
		3) Bangunan Umum	1,6
		4) Perumahan	83,5

		5) Ruang Fasilitas Umum	1,9
4	Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	18
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	8
		d. Musrengbangdes	10
		e. Musyawarah BPD	12
		f. Pembinaan Hansip	
		g. Jumlah Anggota	32
		h. Alat Pemadam Kebakaran	0
		i. Jumlah Hansip Terlatih	32
5.	Ketentraman Dan Ketertiban.	a. Ketentraman Dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian Kriminal	11
		2) Jumlah Bencana Alam	1
		3) Jumlah Operasi Penertiban	10
		b. 4) Jumlah Pos Keamanan	15
		5) Jumlah Kecelakaan	5
		Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		RT/RW – Ada/Tidak	Ada
		PKK – Ada/Tidak	Ada
Karang Taruna – Ada/Tidak	Ada		
6.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	a. Pos Pelayanan Terpadu – Ada/Tidak	Ada
		1) LPM – Ada/Tidak	Ada
		2) Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		3) Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa -Ya/Tidak	Ya
		4) Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		5) Lembaga Adat – Ada Tidak	ada
		b. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	ada

4. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/
----	------------	----------	--------------

			Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1	Sarana Dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	4,7
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	4
		c. Jalan Provinsi (Km)	-
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	4
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan - Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	4
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	4
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	0
		B. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	2
		2). Madrasah Diniyah (Jumlah)	0
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	0
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0		
3	Pembangunan Kesehatan	A. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	
		B. Rumah Sakit Umum Swast (Jumlah)	0
		C. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	0
		D. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	0
		E. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	0
		F. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	0
		G. Rumah Bidan (Jumlah)	2
		H. Puskesmas (Jumlah)	0
		I. Apotik (Jumlah)	0
4.	Pembangunan Sosial Budaya Dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1) Lapangan Sepakbola (Jumlah)	2
		2) Lapangan Bola Voli (Jumlah)	2
		b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:	0
		1) Gelanggang Remaja (Jumlah)	0
		2) Gedung Kesenian (Jumlah)	0
		3) Gedung Teater (Jumlah)	0
		4) Gedung Bioskop (Jumlah)	0
		c. Sarana Sosial:	0
		1) Panti Asuhan (Jumlah)	0
		2) Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	0
		3) Panti Wordo (Jumlah)	0
4) Panti Jompo (Jumlah)	0		

		D. Sarana Komunikasi:	0
		1) Radio Komunitas (Jumlah)	1
		2) Papan Pengumuman (Jumlah)	1
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	3
		b. Industri Besar (Jumlah)	0
		c. Industri Sedang (Jumlah)	0
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	0
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	3
		f. Hotel (Jumlah)	0
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	0
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	5

5. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah, Ada, Tidak Ada, Ya, Tidak
1	2	3	9
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Ada
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014	Ada
		3) Peraturan Menteri Mengenai Desa	Ada
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	2
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa Kali)	6
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	6
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	1
2	Kewajiban Masyarakat Pelaksanaan Hak Dan	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	4
		b. Masyarakat Menyampaikan Informasi Kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat Memperoleh Informasi Dan Pelayanan	Ya

		Yang Adil (Ya/Tidak)	
		d. Masyarakat Mendapatkan Perlindungan Dari Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat Berpartisipasi Dalam Berbagai Kegiatan Di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3	Masyarakat Budaya Dan Sosial	a. Sosialisasi Mengenai Kerukunan Hidup Beragama (Berapa Kali)	2
		b. Sosialisasi Mengenai Pengembangan Olah Raga Dan Kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Mengenai Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat (Berapa Kali)	6
		d. Sosialisasi Mengenai Lingkungan Hidup (Beberapa Kali)	1
		e. Sosialisasi Mengenai Bahaya Narkoba Dan Kriminal (Berapa Kali)	2
		f. Sosialisasi Mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	13
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	2
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	14
		f. Remaja Gereja (Jumlah)	2
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-

6. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah, Ada, Tidak Ada, Ya, Tidak
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Dan Motivasi Masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	2
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	4
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa Kali)	2
2.	Pemberdayaan an Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	12
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	4
		c. Pemberdayaan Olah Raga (Berapa Kali)	3
		d. Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa Kali)	3
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	2

DOKUMENTASI KEGIATAN

MUSYAWARAH DESA, MUSYARAH PEMBANGUNAN, KOORDINASI LINTAS SEKTORAL



PEMERIKSAAN JENTIK, UJI AIR ,IMUNISASI, POSYANDU BALITA, POSYANDU LANSIA



KEGIATAN LINMAS



PENYULUHAN HIV NARKOBA



MITIGASI BENCANA, PENANGANAN PENYAKIT HEWAN, FOGING



KEGIATAN PKK



REMBUG STUNTING



PENGADAAN SARPRAS



PELAYANAN MOBIL SIAGA, AMBULANCE GRATIS



PENGIRIMAN KONTINGEN LOMBA VOLLEY 17SAN, STAN PAMERAN, KESENIAN, DAN LOMBA PKK



